

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA  
AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET  
DI PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKPRI)  
KOTA MALANG**

**Devika Dyah Hadi Yoga, Herman Suryokumoro, Djumikasih  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: devikayoga@rocketmail.com**

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena prinsip kehati-hatian wajib dilaksanakan dalam pemberian pinjaman pada Unit Simpan Pinjam (USP) sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Penelitian dilakukan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang karena meskipun telah melaksanakan prinsip kehati-hatian ternyata dalam praktiknya masih terdapat kredit yang macet dalam pemberian pinjaman.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, Kredit tanpa agunan dan kredit macet.

**APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE PROVISION OF  
UNSECURED LOANS IN AN EFFORT TO PREVENT THE OCCURRENCE OF  
BAD DEBTS IN CENTRAL COOPERATIVE REPUBLIC OF INDONESIA (PKPRI)  
MALANG**

**Devika Dyah Hadi Yoga, Herman Suryokumoro, Djumikasih  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: devikayoga@rocketmail.com**

**ABSTRACT**

In this thesis the author want to discusses about application of the precautionary principle in the provision of unsecured loans in an effort to prevent the occurrence of bad debts in Central Cooperative Republic of Indonesia Malang. The theme background choice for the precautionary principle must be implemented in lending on Savings and Loans Unit (USP) as set forth in Article 19 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Republic of Indonesia Number 19/Per/M. KUKM/XI/2008 About Business Activity Guidelines for Cooperative Savings and Loans By. The study was conducted at the Center for Cooperative Republic of Indonesia Malang because although it has been implementing the precautionary principle in practice it turns out there are still stuck in credit lending.

Key Word: precautionary principle, unsecured loans and bad debt.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA  
AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET  
DI PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKPRI)  
KOTA MALANG**

**A. Pendahuluan**

Koperasi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan dari koperasi sendiri yang diatur dalam Bab II pasal 4 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 83 dijelaskan tentang jenis-jenis koperasi yang terdiri dari:

a. Koperasi Konsumen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

b. Koperasi Produsen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

c. Koperasi Jasa

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Namun Undang-undang tersebut masih belum efektif dikarenakan harus didukung dengan peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan menteri yang saat ini masih belum diterbitkan dan dalam masa transisi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Undang-undang Perkoperasian sebelumnya, pengelompokan koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya atau kesamaan profesi anggotanya. Pengelompokan berdasarkan profesi anggota maka koperasi dibedakan atas profesi-profesi para anggota contohnya Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi yang beranggotakan petani, Koperasi Karyawan (KOPKAR) yang unit kerjanya beranggotakan para karyawan perusahaan swasta dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yaitu Koperasi yang beranggotakan Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi juga dibedakan atas: Koperasi Primer yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan dan Koperasi Sekunder yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Salah satu Koperasi Sekunder adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di tingkat kota.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang lebih dikenal dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah Koperasi yang didalamnya beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri yang secara fungsional tergabung dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan kerja masing-masing dan departemen atau instansi.

Di Kota Malang pada tanggal 15 Juni 1968 telah didirikan Koperasi Pegawai Negeri yang dikenal dengan koperasi sekunder yang di lingkungan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang yang disahkan pemerintah dengan Badan Hukum No: 101/ BH/ II/ 17-68 pada tanggal 12 Oktober 1968. Wilayah kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang bertempat di Jl. Tumenggung Soerjo No 20 Malang.

Kegiatan usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang terdiri dari berbagai macam jenis unit usaha. Salah satu unit usaha andalannya adalah Unit Simpan Pinjam. Kegiatan pokok unit ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggotanya, calon anggotanya dan koperasi lain serta anggotanya yang memerlukan dana.

Praktek simpan pinjam di koperasi yang selama ini dijalankan dengan menggunakan model tanpa jaminan/agunan, sebenarnya kurang memenuhi persyaratan pemberian pinjaman yaitu 4 C adalah terpenuhinya syarat pertama yaitu *Character*, dimana seorang debitur harus dilihat bagaimana wataknya apakah jujur atau tidak. Syarat kedua adalah *Capital* yaitu

besaran pinjaman yang hendak diberikan harus lebih kecil dibanding kekayaan/modal yang dimiliki oleh debitur. Syarat ketiga adalah *Capacity*, artinya adalah rencana usaha yang akan didanai harus memiliki prospek yang bagus dikemudian hari, karena hal ini akan berkait dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan kewajibannya tepat waktu. Sedangkan syarat keempat adalah *Colleteral* atau jaminan, hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ketika debitur ingkar janji (wanprestasi), maka jaminan yang diagunkan tersebut dapat dijadikan alat untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi kredit macet pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat sebagai kegiatan koperasi yang sehat dan aman dalam manajemen koperasi tersebut serta menjalankan prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya, yang peraturan tersebut dibuat sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit.

Dalam prakteknya di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya terutama dengan penerapan persyaratan jaminan pada anggota yang meminjam, menginggit justru anggota lebih memilih berkoperasi karena menghindari adanya persyaratan jaminan tersebut. Namun dari pengamatan awal di koperasi faktanya bahwa angka kredit macet di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang justru sangat kecil sekitar kurang lebih 2 persen dari pinjaman yang tersalurkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan penulis diatas, maka jelas bahwa terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat digali lebih lanjut. Adapun masalah yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang?

2. Apa hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Gambaran Umum Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang**

##### **1.1 Tempat Kedudukan dan Sejarah Singkat Berdirinya Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang**

Lahirnya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) didorong oleh sidang Dewan Menteri pada bulan September 1954 segera membentuk koperasi di kalangan Pegawai Negeri. Tujuan didirikan Koperasi Pegawai Negeri yaitu untuk meringankan beban kebutuhan hidup Pegawai Negeri.

Berdasarkan himbauan dari sidang Dewan Menteri September 1954 tersebut maka Residen Malang beserta pihak-pihak yang terkait terus mengadakan rapat-rapat dengan agenda menghimbau pembentukan Koperasi Pegawai Negeri Kota Malang baik koperasi primer dan koperasi sekunder. Setelah koperasi primer di kalangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) berdiri, dilanjutkan dengan upaya pendirian Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) yang diprakarsai oleh 7 (tujuh) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yaitu:

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Jawatan Penerangan,
- b. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Akademi Pemerintah Dalam Negeri,
- c. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kehutanan Malang Selatan,
- d. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sekolah Guru Atas Rakyat,
- e. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pendidikan Masyarakat,
- f. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Planologi,
- g. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Koperasi Pegawai Kota Besar Malang.

Kemudian pada 26 Juni Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 26 Juni maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 maka telah diputuskan bahwa dibentuk sebuah Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Malang yang pembentuknya ditandatangani oleh 7 (tujuh) Koperasi Pegawai Negeri tersebut.

#### **2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang**

Mengenai prinsip kehati-hatian diatur pada Undang-undang No 17 Tahun 2012 Bab X pasal 88 sampai dengan pasal 95 tentang Koperasi Simpan Pinjam khususnya pada pasal 93 ayat 1 yang berisi:

“Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Tetapi telah dijelaskan lebih lanjut mengenai simpan pinjam, berdasarkan pasal 94 ayat 5 yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun pada prakteknya sampai penulis melakukan penelitian, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terbaru masih belum diterbitkan sehingga kegiatan Unit Simpan Pinjam masih belum berjalan secara optimal karena masih dalam masa transisi dari Undang-undang 25 Tahun 1992 yang sekarang menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2012.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Negara, hal tersebut sejalan dengan pasal 124 ayat 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang:

“Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 25 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.”

Selama ini sebelum adanya Peraturan-peraturan yang terbaru yang mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tersebut di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diatur di dalam pasal 25 yaitu :

“Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.”

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono, SE, Bnedahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

Dan juga diatur di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 19 ayat (2) :

“Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.”

Akan tetapi, Peraturan Menteri No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai asas tersebut, tetapi dalam Peraturan Menteri tersebut telah dijelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian tersebut yang diatur dalam pasal 19 ayat (3) dan ayat (6) yang disebutkan bahwa :

Pasal 19 ayat (3)

“Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.”

Pasal 19 ayat (6)

“Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung.”

Di dalam Peraturan Menteri No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 juga diatur tentang jaminan yang dibebankan kepada peminjam untuk mengurangi resiko kredit macet yang diatur pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.”

Dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas pengaturan prinsip kehati-hatian belum dijabarkan secara rinci, seharusnya dibuat aturan khusus yang memuat tentang rincian dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Mengenai pelaksanaannya dari ADART sendiri, sampai dengan penelitian dilaksanakan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang belum diterbitkan peraturan khusus tentang kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP). Sehingga penerapan prinsip kehati-hatian di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang hanya berdasarkan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah.

## **2.1 Prosedur Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Angsuran Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang**

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang sampai saat ini masih menggunakan proses permohonan pinjaman secara manual. Dalam pemberian

pinjaman pemohon pinjaman harus anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang yang masih aktif. Adapun prosedurnya sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Pinjaman

Apabila pemohon ingin mengajukan pinjaman maka bendahara dari pemohon harus menyerahkan surat permohonan bantuan dana kepada bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.<sup>2</sup>

2. Setelah itu bendahara dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang menerbitkan surat permohonan berupa surat pengakuan hutang (SPH) yang di formulir tersebut telah dijelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon pinjaman.

Kemudian pemohon mengisi semua ketentuan dari formulir tersebut seperti nama ketua dan bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia setelah itu bendahara dari pemohon kembali kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) untuk mendapatkan persetujuan dari pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan Kepala Dinas atau Instansi. Setelah itu bendahara dari pemohon kembali lagi kepada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang untuk meminta persetujuan dari Ketua Bidang Unit Simpan Pinjam (USP). Kemudian setelah berkas-berkas tersebut di isi dengan lengkap disertai dengan materai 6000 dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut dibuat rangkap dua yang pertama untuk peminjam dan yang kedua yang meminjamkan.<sup>3</sup>

3. Kasir mencairkan dana yang dibutuhkan oleh pemohon pinjaman dan diberikan kwitansi (KW) rangkap 3 (tiga), kwitansi (KW) 1 (satu) diberikan kepada bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang yang 2 (dua) diberikan kepada bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan yang 3 (tiga) disimpan sebagai arsip untuk penagihan.

Untuk peminjaman yang pertama diwajibkan untuk membayar biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pinjaman dan dipotong langsung dari jumlah pinjaman yang diterima Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) selanjutnya bunga 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari setiap angsuran, setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman peminjam diwajibkan

---

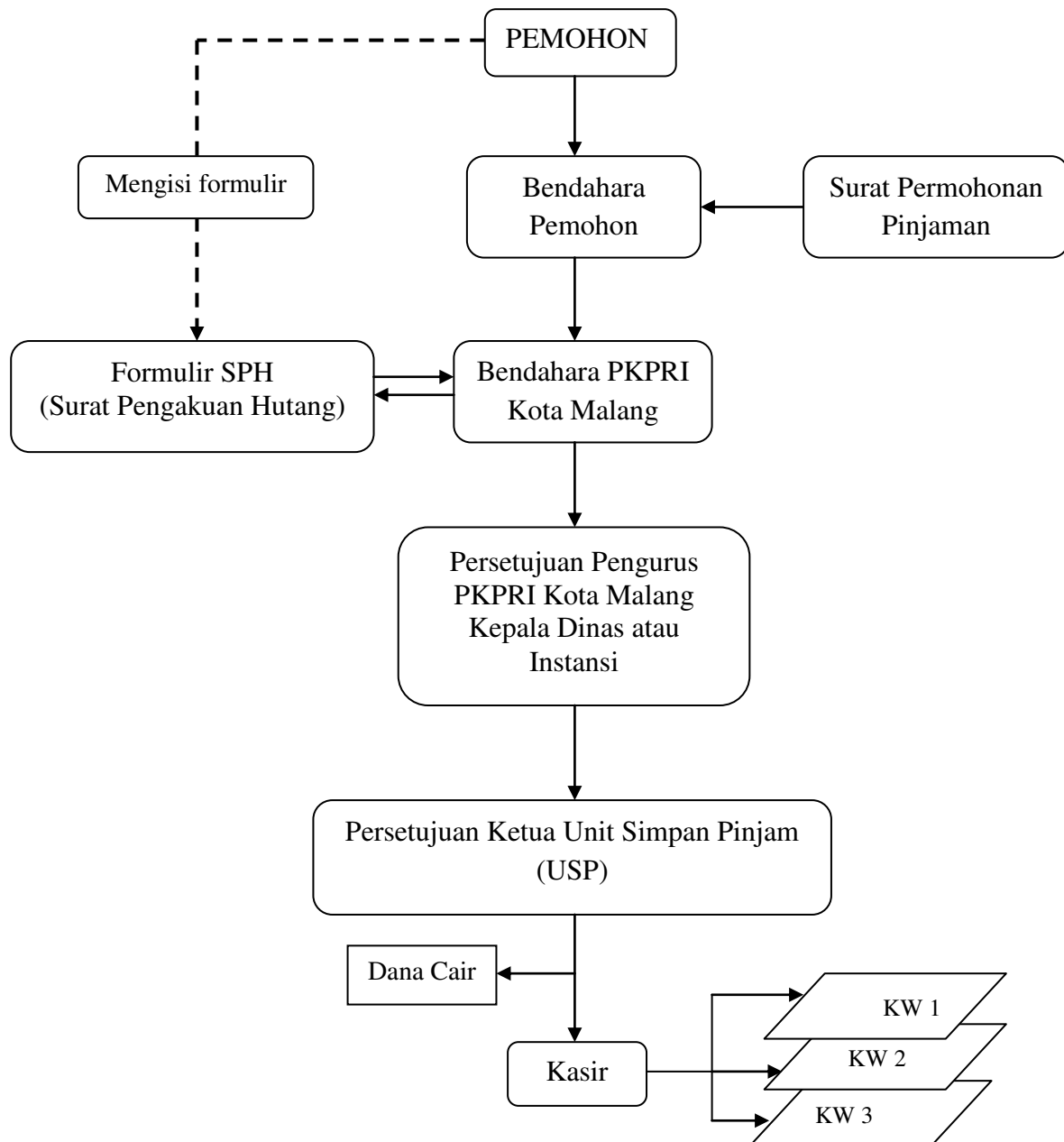
<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Moch. Sjakri, Administrasi USP Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 6 November 2013.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Moch. Sjakri, Administrasi USP Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 6 November 2013.



membayar denda sebesar 1% persen (satu persen) dari angsuran menurun, pelunasan pinjaman harus sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan bila pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo maka atas peminjam diperhitungkan jasa 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari sisa angsuran. Pinjaman ini berlangsung selama jangka waktu minimal 12 (dua belas) bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Akad Pengakuan Hutang.<sup>4</sup>

**Gambar 1 : Alur Sistem Pemberian Pinjaman**



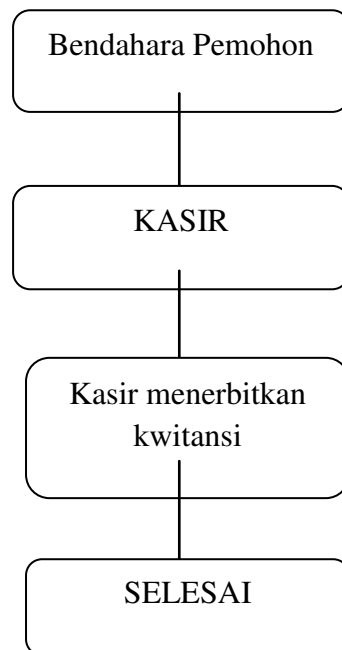
**Sumber : Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang, 2013.**

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Moch. Sjakri, Administrasi USP Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 6 November 2013.

## 2.2 Sistem Penerimaan Angsuran

Dalam Sistem Penerimaan Angsuran di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang yaitu bendahara pemohon pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) membayarkan angsuran setiap bulan dengan jumlah yang sama besarnya ditambah jasa 1,25% persen (satu koma dua puluh lima persen) kepada kasir dan kasir menerbitkan 2 (dua) rangkap kwitansi yang 1(satu) untuk pemohon dan yang 2 (dua) untuk arsip pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

**Gambar 2: Alur Sistem Penerimaan Angsuran**



**Sumber : Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang, 2013.**

Pelaksanaan suatu prinsip kehati-hatian atau aturan perUndang-undangan dapat berjalan dengan efektif atau tidaknya tersebut berdasarkan teori I.W Friedman yang dalam teori tersebut telah dijelaskan dalam 3 (tiga) unsur yang berkaitan dengan sistem hukum.

- a. Substansi (*substance*)
- b. Struktur (*structure*)
- c. Kultur hukum (*legalculture*)

Berdasarkan 3 (tiga) unsur tersebut penerapan prinsip kehati-hatian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang berlangsung sebagai berikut:

Faktor substansi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada Unit Simpan Pinjam (USP), sampai dengan penelitian dilaksanakan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang belum diterbitkan peraturan khusus tentang kegiatan Unit

Simpan Pinjam (USP) sehingga penerapan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah hanya berdasarkan pada penafsiran dari pengurus.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian masih terbatas pada peraturan internal (penafsiran pengurus) yang kemungkinan besar dapat menimbulkan resiko terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu sebaiknya pihak pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang perlu mengkaji ulang substansi-substansi dalam kegiatan usaha Unit Simpan Pinjam agar resiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir.

Dalam struktur hukum mencakup pelaksana hukum yang menjalankan peraturan, dalam hal ini di koperasi berkaitan dengan pengelolaan dan peminjam. Para pengelola koperasi belum semua memahami atau mengerti secara utuh prinsip kehati-hatian yang diatur baik dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008.<sup>5</sup>

Terutama pada tingkat manajer dan karyawan bisa dikatakan belum memahami Undang-undang tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan hanya semata-mata dilakukan dalam rangka pengamanan pinjaman yang disalurkan dengan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008.

Berdasarkan observasi dengan mewawancarai para pengawas dan pengelola dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pengurus dan karyawan yang tidak mengerti dan belum pernah membaca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang seharusnya tiap-tiap pengurus dan karyawan harus mengerti betul mengenai peraturan tersebut agar tidak terjadi kerancuan mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman. Pada umumnya mereka melaksanakan pemberian pinjaman kepada anggota hanya berdasarkan perintah dan petunjuk dari pengurus koperasi tanpa harus memahami dan mengetahui apa isi

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono. SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

peraturan tersebut, sementara di kalangan pengurus hanya sebagian kecil yang mengerti tentang peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas seharusnya para pengurus dan karyawan dalam hal ini yang dapat disebut dengan anggota koperasi harus sesuai dengan prinsip koperasi yang kedua yakni :

“Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dan koperasi-koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.”

Disamping itu ketidak mengertian pengurus dan karyawan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang seharusnya tidak terjadi apabila pihak Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang telah menerapkan prinsip koperasi yang kelima mengenai pendidikan, pelatihan dan informasi, yang dijabarkan sebagai berikut :

“Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasinya.”

Jadi suatu struktur yang baik adalah struktur yang memahami tentang peraturan-peraturan yang berlaku di suatu organisasi yang dalam hal ini yakni penerapan prinsip kehati-hatian pada Pusat Koperasi Pegawai republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang. Apabila struktur telah memahami bagaimana tentang penerapan prinsip kehati-hatian maka kemungkinan terjadinya kredit macet akan dapat dicegah sedini mungkin dan tidak menyebabkan hal-hal yang merugikan kegiatan simpan pinjam di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

Dari faktor kultur koperasi sebagai kumpulan orang yang dalam prakteknya menggunakan pola hubungan yang harmonis antara pengurus, pengawas, karyawan dan anggota yang terlihat lebih menonjol. Hal tersebut terutama pada pola pelayanan kepada peminjam yang lebih mengedepankan pola keharmonisan dan pola pelayanan yang saling percaya kepada sesama anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang. Demikian pula kultur di dalam Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang dalam penerapan prinsip kehati-hatian lebih mengarah kepada pola harmonisasi

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono. SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

dan rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dengan anggota koperasi pada saat melakukan pinjaman kepada anggota, dikarenakan anggota dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang yang telah terdaftar dalam buku anggota.<sup>7</sup>

Jadi sampai saat ini dalam pemberian pinjaman kepada anggota hanya mengarah kepada rasa saling percaya kepada anggota karena tidak dimungkinkan terjadi kredit macet kepada anggotanya padahal dalam kenyataannya yang telah penulis teliti masih ada terjadi kredit macet yang terjadi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang. Seharusnya dalam pemberian pinjaman kepada anggota juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 19 ayat (2) yang berisi sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggota.”

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dari 3 (tiga) faktor dari substansi, struktur dan kultur ternyata bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal karena belum diterbitkannya peraturan khusus tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada anggota di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

### **3 Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian bagi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang**

Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang dalam faktanya tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Masih terdapat banyak hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada anggota. Hambatan tersebut antara lain dapat diuraikan seperti dibawah ini :<sup>8</sup>

- a. Berdasarkan yang terjadi di lapangan saat penulis melakukan wawancara, pada umumnya pemaham pengurus dan pengawas terhadap prinsip kehati-hatian masih kurang dikarenakan tingkat pemahaman tentang Undang-undang, Peraturan Menteri

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono. SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono. SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

dan Peraturan Pemerintah masih rendah sekali. Pengurus dan pengawas tidak membaca secara langsung tetapi mereka memahaminya dengan proses sosialisasi dan proses pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Selain itu pengurus dan pengawas lebih terfokus terhadap isi dari ADART daripada memahami Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Padahal pada pelaksanaan diklat-diklat dan sosialisasi koperasi, pembahasan substansi yang diajarkan lebih bersifat umum dan sosialisasi atau diklat tersebut hanya diikuti karyawan dan pengurus secara terbatas jadi tidak semua dari karyawan dan pengurus mengetahui dan memahami tentang prinsip kehati-hatian tersebut dan proses dari pemahaman Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan semestinya dalam kegiatan usaha simpan pinjam (USP).

- b. Kemudian jika ditinjau dari struktur. Struktur sumber daya manusia pada Pusat Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang memiliki *background* yang berbeda-beda dan kebanyakan dari sumber daya tersebut tergolong pada tingkat pendidikan yang rendah artinya karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana masih sedikit, kebanyakan dari karyawan tersebut berasal dari tingkat pendidikan sekolah dasar pertama dan sekolah dasar menengah. Dari faktor latar belakang pendidikan inilah yang menjadikan pemahaman pengurus dan karyawan kepada peraturan per Undang-undangan masih kurang memahami sepenuhnya, khususnya tentang aturan khusus tentang Unit Simpan Pinjam (USP) yang dibuat oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang. Sehingga karyawan dari Unit Simpan Pinjam (USP) hanya menuruti apa yang telah dikatakan oleh pengurus walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan per Undang-undangan.
- c. Dalam hal budaya, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan kekeluargaan dan menempatkan anggota sebagai pelanggan sehingga terjadi hal yang bersifat harmonis yang menjadikan hubungan antara anggota satu dengan anggota lain tidak terdapat adanya batasan ataupun sekat, sehingga sering kali koperasi mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pinjaman pada Unit Simpan Pinjam (USP) yang berujung pada terjadinya kredit macet atau bisa dikatakan kegiatan Unit Simpan Pinjam belum dilaksanakan secara optimal akibat adanya

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono. SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

budaya terlalu percaya dan ini dapat merugikan koperasi pada khususnya serta anggota lain pada umumnya.<sup>10</sup>

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman pada Unit Simpan Pinjam (USP) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang telah dilakukan tetapi masih belum berjalan secara optimal dikarenakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008. Seharusnya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut diatur lebih lanjut pada peraturan khusus yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan ADART yang ternyata belum diterbitkan karena adanya masa transisi dari Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang sekarang menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2012.
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada anggota Unit simpan Pinjam (USP) di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang telah dilaksanakan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut :
  - 1) Masih banyaknya terdapat substansi per Undang-undangan tentang prinsip kehati-hatian yang belum dipahami dalam pemberian pinjaman kepada anggota.
  - 2) Tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang Unit Simpan Pinjam (USP) pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.
  - 3) Adanya rasa saling percaya antar anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang dalam pemberian pinjaman kepada anggota yang menyebabkan koperasi terkesan bersikap abai terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Disarankan :

- a. Bagi Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Sartono, SE, Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, pada tanggal 18 November 2013.

Seharusnya pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang membuat peraturan khusus yang mengatur tentang Unit Simpan Pinjam sehingga Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah tidak hanya berdasarkan pada penafsiran saja. Dan seharusnya semua pengurus memahami betul serta menerapkan apa yang telah dijelaskan pada per Undang-undangan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian.

- b. Bagi Karyawan Unit Simpan Pinjam (USP) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

Unit Simpan Pinjam (USP) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman, seharusnya sebelum penyaluran pinjaman dilakukan karyawan harus terlebih dahulu mengerti dan memahami tentang apa yang diatur dalam per Undang-undangan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian tidak hanya dengan menuruti apa yang telah dikatakan oleh pengurus saja.

- c. Bagi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang.

Bagi anggota yang akan melakukan pinjaman kepada Unit Simpan Pinjam (USP) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang, disarankan untuk senantiasa mentaati segala prosedur pemberian pinjaman yang diberikan oleh pihak Unit Simpan Pinjam (USP) bersifat jujur dan terbuka, dikarenakan adanya sikap saling percaya kepada sesama anggota.

## **E. Daftar Pustaka**

Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.

Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer Cetakan ke 2*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.



G Kartasaputra dan A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Kuncoro Suhardjono, Mudrajad, *Manajemen Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Yahya H.M, *Manajemen Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI)*, Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

#### **F. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 **Tentang Perkoperasian.**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 **Tentang Perkoperasian.**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 **Tentang Perbankan.**

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 **Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.**